



## GOOD TOURISM GOVERNANCE DI POS BLOC MEDAN DALAM MENCIPTAKAN INOVASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MEDAN

Tesalonika Gultom<sup>a\*</sup>, Victor Lumbanraja<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [tesalonikagultom27@gmail.com](mailto:tesalonikagultom27@gmail.com),  
Universitas Sumatera Utara, Medan

<sup>b</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, [victor.lumbanraja@usu.ac.id](mailto:victor.lumbanraja@usu.ac.id),  
Universitas Sumatera Utara, Medan

\* Korespondensi

### ABSTRACT

*This study aims to analyze Good Tourism Governance (GTG) at Pos Bloc Medan in creating innovation and the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Medan City. Pos Bloc Medan is a creative space developed through the revitalization of a heritage building, playing a strategic role in supporting the creative economy and tourism sectors in Medan City. However, the management of this area still faces several challenges, including limited involvement of local communities in decision-making, unequal access to participation for MSME actors, dominance of larger-scale businesses, weak engagement from the local government, and suboptimal waste management and supporting infrastructure.*

*This research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants include Pos Bloc Medan's management, MSMEs actors, visitors, and the Medan City Tourism Office. The findings reveal that GTG principles have been implemented, including community participation, stakeholder involvement, local ownership and partnership, sustainable resource use, accommodation of public aspirations, program monitoring and evaluation, environmental accountability, community training, and promotion of local cultural values, although many of these practices remain informal.*

*The application of GTG has proven to positively contribute to the creation of inclusive spaces that stimulate product innovation, strengthen local branding, and and the growth of local MSMEs. Therefore, it is necessary to reinforce participatory and collaborative principles in the governance of Pos Bloc Medan. The management is expected to expand access and equal opportunities for local MSMEs, while increasing community involvement in planning and implementation. Moreover, local government must play an active role in formulating collaborative and sustainable policies to build a fair, innovative, and has a broad impact on local MSME actors.*

**Keywords:** Good Tourism Governance, MSMEs, Innovation, Pos Bloc Medan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Good Tourism Governance* (GTG) di Pos Bloc Medan dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Medan. Pos Bloc Medan merupakan kawasan kreatif hasil revitalisasi bangunan heritage yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata di Kota Medan. Namun, pengelolaan kawasan ini masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, ketimpangan akses partisipasi bagi pelaku UMKM, dominasi usaha menengah ke atas, lemahnya peran pemerintah daerah, serta belum optimalnya pengelolaan limbah dan fasilitas pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pengelola Pos Bloc Medan, pelaku UMKM, pengunjung, serta Dinas Pariwisata Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GTG di Pos Bloc Medan sudah diterapkan, seperti prinsip partisipasi masyarakat terkait, keterlibatan segenap pemangku terkait, kemitraan dan kepemilikan lokal, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, mengakomodasi aspirasi masyarakat monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan, pelatihan pada masyarakat terkait, serta promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan, sekalipun masih bersifat informal.

Penerapan GTG terbukti berkontribusi positif dalam menciptakan ruang inklusif yang menciptakan munculnya inovasi produk, penguatan branding lokal, dan pertumbuhan UMKM lokal. Untuk itu, diperlukan penguatan prinsip partisipatif dan kolaboratif dalam tata kelola Pos Bloc Medan. Pengelola diharapkan memperluas akses dan pemerataan peluang bagi UMKM lokal, serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Pemerintah daerah juga perlu memainkan peran aktif dalam membangun kebijakan kolaboratif dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem pariwisata yang adil, inovatif, dan berdampak luas bagi pelaku UMKM lokal.

**Kata Kunci:** *Good Tourism Governance*, UMKM, Inovasi, Pos Bloc Medan

## 1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, konsep Good Governance telah meluas dari sektor pemerintahan ke berbagai bidang lain, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam konteks tersebut, lahirlah konsep *Good Tourism Governance*, yang menekankan pentingnya tata kelola destinasi wisata secara inklusif, berkelanjutan, dan kolaboratif, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat. *Good Tourism Governance* memuat prinsip-prinsip seperti 1) Partisipasi masyarakat terkait; 2) Keterlibatan segenap pemangku kepentingan; 3) Kemitraan kepemilikan lokal; 4) Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; 5) Mengakomodasi aspirasi masyarakat; 6) Daya dukung lingkungan; 7) Monitor dan evaluasi program; 8) Akuntabilitas lingkungan; 9) Pelatihan pada masyarakat terkait; 10) Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan (Sunaryo, 2013), dan diyakini mampu memperkuat daya saing pariwisata sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM (Hall, 2011).

Indonesia sebagai negara kaya potensi wisata mengalami peningkatan dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI), namun tantangan masih ada, terutama dalam penguatan tata kelola destinasi dan pelibatan pelaku lokal. Kota Medan, sebagai salah satu pusat pariwisata di Sumatera Utara, memiliki aset berharga berupa gedung bersejarah. Kantor Pos yang telah direvitalisasi menjadi Pos Bloc Medan yang merupakan sebuah ruang kreatif hasil kolaborasi antara PT Pos Properti Indonesia dan PT Ruang Kreatif Pos (bagian dari M Bloc Group). Sejak diresmikan pada Oktober 2022, Pos Bloc Medan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui penyediaan fasilitas yang mendorong inovasi dan akses pasar yang lebih luas.

Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* di Pos Bloc Medan menjadi studi yang relevan karena kawasan ini memadukan pelestarian heritage dengan ekonomi berbasis komunitas. Namun, hasil observasi dan survei menunjukkan sejumlah tantangan, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat lokal, ketimpangan akses bagi pelaku UMKM (terutama usaha mikro lokal), serta minimnya peran pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola dan keberlanjutan kawasan. Selain itu, masih ditemukan kelemahan dalam pemenuhan standar pengelolaan wisata berbasis risiko sesuai Permenparekraf No. 4 Tahun 2021, seperti kurangnya fasilitas darurat, sistem pengelolaan limbah yang belum optimal, dan belum adanya skema pelibatan warga sekitar secara sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* diterapkan dalam pengelolaan Pos Bloc Medan dan sejauh mana *Good Tourism Governance* tersebut menciptakan inovasi serta pertumbuhan UMKM. Fokus penelitian diarahkan pada aspek kolaborasi antara pengelola, UMKM, komunitas, dan pemerintah, serta hambatan struktural dan kelembagaan yang muncul dalam praktik tata kelola di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan tata kelola destinasi wisata berbasis *Good Tourism Governance*, serta memberikan rekomendasi bagi pengelola kawasan dan pembuat kebijakan dalam mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Good Governance*

*Good Governance* didefinisikan sebagai suatu mekanisme pemerintahan yang menekankan pengelolaan sumber daya secara efektif dan adil dengan melibatkan sektor pemerintah serta non-pemerintah (swasta) sebagai upaya kolektif untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Institut Administrasi Negara & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (IAN & BPKP) mendefinisikan *good governance* adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. Prinsip-prinsip utama dari *good governance* antara lain partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan (UNDP, 1997; Permana dalam Judijanto, 2024). Prinsip-prinsip ini berperan dalam memastikan tata kelola yang baik diterapkan di berbagai sektor, termasuk pariwisata.

### 2.2. *Good Tourism Governance*

*Good Tourism Governance* (GTG) adalah adaptasi dari konsep *good governance* yang diterapkan pada sektor pariwisata. Sunaryo (2013) menjelaskan bahwa GTG melibatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Bramwell (2011) menambahkan bahwa GTG adalah upaya menciptakan keteraturan sosial melalui kebijakan dan aksi kolektif dari para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip GTG yang dirumuskan oleh Sunaryo (2013) meliputi: partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan lokal, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, akomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi, akuntabilitas lingkungan, pelatihan masyarakat, serta promosi nilai budaya lokal.

Dalam konteks pembangunan pariwisata, tata kelola yang baik berdampak langsung terhadap keberhasilan suatu destinasi. Hall (2011) dan Bramwell & Lane (2011) menekankan bahwa tata kelola yang buruk justru akan menghambat pertumbuhan sektor pariwisata melalui lemahnya infrastruktur, keamanan, keberlanjutan, investasi, dan pelayanan.

### 2.3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Pertumbuhan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian vital dalam pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM didefinisikan sebagai usaha yang dikelola secara mandiri dengan skala kecil, tenaga kerja terbatas, dan cakupan pasar lokal (Simmons et al., 2008; BPS & Kemenkop UKM dalam Khairunnisa et al., 2022). Di Kota Medan, pertumbuhan UMKM menunjukkan tren positif. Data menunjukkan jumlah UMKM meningkat signifikan dari 4.900 unit pada tahun 2020 menjadi 90.000 unit pada tahun 2022 (Aruan, 2023), dengan sektor kuliner sebagai yang paling dominan (Fadlan et al., 2023). Namun, UMKM juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan permodalan, kualitas SDM, keterbatasan akses pasar, infrastruktur, dan regulasi. Pertumbuhan UMKM di Kota Medan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Meutia Dewi (2022) menyebutkan pertumbuhan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses permodalan, kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pasar dan pemasaran, infrastruktur dan teknologi, serta regulasi dan kebijakan pemerintah.

### 2.4. Inovasi

Inovasi dalam konteks UMKM adalah proses menciptakan atau menyempurnakan produk dan layanan yang memberikan nilai tambah (Wiratmo, 2001; Suryana, 2014). Inovasi memungkinkan pelaku UMKM beradaptasi terhadap perubahan dan memperluas pasar melalui strategi yang relevan dan kreatif (Swalha & Anchor, 2012; Klewitz & Hansen, 2014). Inovasi menjadi faktor kunci dalam mempertahankan keberlanjutan dan meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam penerapan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* di Pos Bloc Medan dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan UMKM. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fenomena sosial, praktik tata kelola, serta pengalaman langsung dari para pelaku UMKM dan pemangku kepentingan. Penelitian dilaksanakan di Pos Bloc Medan, yang berlokasi di Jalan Pos No. 1, Kesawan, Kota Medan. Lokasi ini dipilih karena merupakan ruang publik kreatif hasil transformasi bangunan heritage oleh PT Pos Properti Indonesia dan PT Ruang Kreatif Pos, dengan peran strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Pos Bloc Medan, pelaku UMKM, pengunjung, dan Dinas Pariwisata; Observasi terhadap kondisi fisik, aktivitas pengelolaan, serta interaksi pengunjung dan tenant; dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan tiga kategori

informan: informan kunci (Project Manager Pos Bloc Medan), informan utama (pelaku UMKM di Pos Bloc Medan), dan informan pendukung (Pengunjung Pos Blo dan perwakilan Dinas Pariwisata Kota Medan).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Good Tourism Governance* di Pos Bloc Medan ditujukan untuk melihat bagaimana ruang kreatif publik yang dimulai dari revitalisasi Kantor Pos Medan dapat menciptakan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pariwisata komunitas. *Good Tourism Governance* atau yang dapat di kenal dengan tata kelola kepariwisataan yang baik merupakan konsep yang diadaptasi dari Konsep Good Governance untuk melakukan pengelolaan di sektor pariwisata, yang dimana pengelolaan tersebut berdasarkan keterlibatan 3 (tiga) aktor kunci, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Sunaryo, 2013). Sehingga dapat dipahami bahwa pengelolaan destinasi yang ideal perlu adanya keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkolaboratif yaitu antara pemerintah, pengelola Pos Bloc Medan, masyarakat lokal, dan juga pelaku UMKM untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di Pos Bloc Medan.

##### 4.1 Partisipasi Masyarakat Terkait

Arimbi (1993:1) dalam Laily dan Imro'atin (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat sebagai suatu bentuk komunikasi timbal balik yang berlangsung secara berkelanjutan. Dalam teori Sunaryo mengenai prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* prinsip partisipasi masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam merumuskan visi, misi, atau tujuan dalam pembangunan pariwisata, berpartisipasi dalam mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, juga turut serta dalam pelaksanaan program atau rencana yang telah ditetapkan, serta mengawasi perkembangan sektor pariwisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Pos Bloc Medan diterapkan dengan pengelola menyediakan mekanisme kurasi dan kanal media sosial untuk menampung masukan pelaku UMKM, namun keterlibatan publik umum masih terbatas pada pelaku usaha dan bergantung inisiatif individu dari kanal digital. Partisipasi masyarakat di Pos Bloc Medan masih cenderung hanya sebatas pada pelaku usaha UMKM saja dan belum secara inklusif menjangkau masyarakat umum sebagai bagian yang perlu terlibat dalam tata Kelola pariwisata yang baik di Pos Bloc Medan. Kegiatan partisipatif di Pos Bloc Medan juga masih belum menjangkau pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat secara luas.

##### 4.2 Keterlibatan Segenap Pemangku Terkait

Keterlibatan segenap pemangku terkait menjadi hal yang menentukan keberhasilan dari tata kelola kepariwisataan yang baik. Yang dimana keterlibatan pemangku yang diharapkan yaitu adanya keterlibatan serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Sunaryo:2013). Dalam penerapan *Good Tourism Governance* prinsip keterlibatan segenap pemangku terkait penting untuk melihat adanya kolaborasi antara berbagai aktor baik dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dari prinsip ini keterlibatan yang diharapkan tidak hanya bersifat formal, namun juga perlu adanya partisipasi aktif dalam mencapai sebuah keputusan, perencanaan, pelaksanaan program hingga sampai evaluasi dari dampak berjalannya kegiatan pariwisata.

Jika dilihat dari konteks Pos Bloc Medan yang merupakan destinasi wisata yang berbasis pemanfaatan aset milik negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahwa keterlibatan segenap pemangku terkait menjadi hal yang penting dalam memastikan keberlangsungan seluruh pemangku kepentingan terlibat, termasuk pemerintah dan UMKM lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi internal Pos Bloc Medan, PT Pos, dan Dinas Pariwisata sudah berjalan, tetapi belum ada forum strategis lintas-sektor yang melibatkan pelaku UMKM dan masyarakat secara menyeluruh.

##### 4.3 Kemitraan dan Kepemilikan Lokal

Tata kelola kepariwisataan yang baik atau *Good Tourism Governance* merupakan konsep tata kelola yang mengedepankan kolaborasi serta peran aktif dari masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat lokal tidak hanya sebagai subjek yang merasakan dampak positif adanya pariwisata, namun juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan dan juga perlu terlibat di dalamnya. Kemitraan kepemilikan lokal pada konteks prinsip *Good Tourism Governance* tidak hanya berupa penguasaan aset fisik, melainkan dapat meliputi adanya kesempatan, partisipasi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam

berbagai tahapan pengambilan keputusan, dan pengembangan bisnis wisata.

Pada konteks Pos Bloc Medan, yang merupakan hasil kolaborasi antara PT Pos Indonesia dengan pihak swasta PT Ruang Kreatif Pos penting untuk diketahui seberapa jauh masyarakat lokal terutama pelaku UMKM di Kota Medan benar-benar dilibatkan sebagai mitra Pos Bloc Medan, bukan hanya sekedar sebagai penyewa tempat saja. Kemitraan tersebut dapat dilihat dari proses pemilihan tenant, model kerja sama, program pendampingan, sampai dengan adanya wadah bagi aspirasi masyarakat lokal dalam pengembangan Pos Bloc Medan sebagai pusat kegiatan kreatif dan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kurasi dan bagi hasil memastikan profesionalitas tenant, namun pendanaan, subsidi, atau koperasi lokal belum diintegrasikan, sehingga usaha menengah yang lebih kuat modal akan menjadi usaha yang lebih dominan keberadaannya di Pos Bloc Medan. Hal tersebut menunjukkan hilangnya citra inklusif bagi UMKM lokal karena belum sepenuhnya merata. Di Pos Bloc Medan, kepemilikan usaha cenderung dipegang oleh perseorangan atau badan usaha yang secara finansial dan operasional mampu mengikuti aturan yang disesuaikan oleh pengelola. Sistem yang diterapkan adalah model bisnis berdasarkan seleksi dan kinerja, yang di mana pengusaha dinilai sanggup memenuhi target dan prosedur.

#### **4.4 Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut**

Menurut Sunaryo (2013) pemanfaatan sumber daya secara berlanjut dapat diartikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor pariwisata seharusnya dimanfaatkan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas pariwisata perlu menjauhi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya yang tidak dapat dipulihkan. Pos Bloc Medan sebagai salah satu pusat kreativitas di Kota Medan, tentu memiliki kewajiban untuk mengelola aset yang dimilikinya secara lestari, termasuk dalam hal penanganan sampah, pelestarian bangunan bersejarah, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal agar mampu berdaya saing dan berkembang bersama dengan kawasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pemanfaatan sumber daya secara berlanjut sudah berjalan di Pos Bloc Medan. Pihak manajemen Pos Bloc Medan menyampaikan bahwa pengelolaan sampah sudah terorganisir dengan baik terbukti dari adanya kerja sama dengan penyedia jasa khusus yang mengangkat sampah setiap hari. Dalam perjanjian kerja sama (PKS) dengan para penyewa tenant juga yang didalamnya sudah tercantum prinsip ramah lingkungan termasuk larangan penggunaan plastik sekali pakai. Akan tetapi, dalam penerapannya hal ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak dari pengunjung yang belum terbiasa dalam mengurangi pemakaian alat makanan dari bahan plastik..

#### **4.5 Mengakomodasikan Aspirasi Masyarakat**

Menurut Sunaryo (2013) dalam Utamy, Susanti, Runiawati (2023), prinsip mengakomodasikan aspirasi masyarakat mengharuskan adanya sebuah wadah diskusi yang terbuka, komunikasi yang responsive, dan juga sistem pengelolaan yang fleksibel dengan kebutuhan dan perubahan yang dirasakan masyarakat. Pos Bloc Medan sebagai kawasan wisata kreatif dengan memanfaatkan bangunan bersejarah ini memiliki karakteristik sosial yang dapat dikatakan kompleks dan juga dinamis. Adanya keberagaman komunitas serta tingginya kedatangan pengunjung, membuat manajemen perlu mampu menyeimbangkan antara pengembangan kawasan dengan penerimaan masukan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang disediakan oleh pihak pengelola Pos Bloc Medan yaitu melalui media sosial resmi milik Pos Bloc Medan. Aspirasi yang diterima melalui media sosial di respons, menghasilkan program seperti pertunjukan *street dance*, namun belum ada survei kepuasan formal, kotak saran, atau forum rutin yang diberikan langsung oleh pihak pengelola kepada masyarakat seperti pelaku UMKM atau pengunjung di Pos Bloc Medan. Pos Bloc Medan sudah memberikan kesempatan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat, terutama dapat dilihat melalui interaksi langsung dan penggunaan media sosial. Hanya saja dalam penerapannya masih diperlukan penguatan yang lebih spesifik berfokus pada aspirasi masyarakat seperti dengan menyediakan situs resmi dan sistem yang lebih terstruktur untuk menampung, mengevaluasi dan menindaklanjuti aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat di lingkungan Pos Bloc Medan.

#### **4.6 Daya Dukung Lingkungan**

Menurut Sumawarwoto (1993) dalam Muhamad (2012) daya dukung lingkungan adalah sebuah batas kemampuan suatu lokasi pariwisata dalam menampung jumlah wisatawannya, di mana jumlah wisatawan tersebut tidak melebihi kapasitas sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau penurunan

kualitas lingkungan di kawasan pariwisata tersebut. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa daya dukung lingkungan merupakan suatu kemampuan dari kawasan wisata untuk menampung aktivitas pengunjung tanpa melebihi batas kapasitas area wisata sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memberikan manfaat yang nyata dengan dampak negatif yang minimal.

Penerapan dari prinsip daya dukung lingkungan di Pos Bloc Medan dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh pengelola dalam mengelola limbah, menjaga kebersihan, dan penyesuaian kapasitas Pos Bloc dengan jumlah pengunjung yang berkunjung. Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip daya dukung lingkungan di Pos Bloc Medan sudah berjalan dengan baik. Hal ini karena pengelolaan sampah, kebersihan, daya tampung kawasan, dan pelestarian bangunan yang ada memastikan kegiatan pariwisata di Pos Bloc Medan tidak membawa dampak negatif kepada lingkungannya. Hanya saja pengunjung mengharapkan untuk adanya pengembangan area hijau di sekitar Pos Bloc Medan.

#### 4.7 Monitoring dan Evaluasi Program

Menurut Susanto (2017) evaluasi program didefinisikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mendapatkan informasi apakah program yang dijalankan sudah direalisasikan atau tidak dengan memperhatikan efektivitas dari masing-masing komponennya yang didapatkan dari seorang evaluator. Susanto (2017) juga mengatakan bahwa evaluasi program mencakup monitoring program penilaian apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Monitoring program juga dapat dipahami untuk memberikan masukan kembali pada program yang dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa weekly internal meeting sudah memadai, hal ini ditunjukkan melalui adanya dilakukan penilaian secara berkala setiap seminggu sekali bersamaan dengan pihak Pos Bloc di pusat dan juga adanya diskusi secara informal antara manajemen internal Pos Bloc Medan dengan waktu yang menyesuaikan kapan mereka bisa berdiskusi. Hasil dari adanya prinsip monitoring dan evaluasi program di Pos Bloc Medan yaitu munculnya program-program yang inovatif seperti Monday *Super Deal* dan *Bogodeal (Buy One Get One)*, yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan transaksi dengan tenant-tenant usaha di Pos Bloc Medan pada hari-hari yang terbilang sepi dikunjungi pengunjung Tetapi evaluasi eksternal (survei pengunjung) belum diadakan, sehingga dapat mengurangi umpan balik bagi inovasi UMKM.

#### 4.8 Akuntabilitas Lingkungan

Akuntabilitas lingkungan dalam konteks ini merujuk pada tanggung jawab moral, sosial, dan operasional dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pengelola Pos Bloc Medan, pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta pengunjung dalam memastikan bahwa aktivitas pariwisata yang berlangsung tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik dan sosial di sekitarnya. Di Pos Bloc Medan, penerapan prinsip ini dapat dianalisis melalui kebijakan pengelolaan sampah, penggunaan material ramah lingkungan oleh pelaku usaha, penyediaan fasilitas penunjang seperti tempat sampah terpilah dan ruang terbuka hijau, serta kampanye edukasi kepada pengunjung terkait perilaku wisata yang ramah lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis atau laporan lingkungan berkala sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pengelola Pos Bloc Medan dalam memastikan bahwa kegiatan pariwisata yang berlangsung di Pos Bloc Medan tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar baik itu dari fisik bangunan tempat wisata dan social. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi dan peninjauan pengelolaan limbah yang dilakukan di Pos Bloc Medan masih bersifat informal

#### 4.9 Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Menurut Sunaryo (2013) tata kelola pariwisata yang baik memerlukan adanya penerapan prinsip pelatihan pada masyarakat terkait, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan kepada masyarakat, dan juga untuk meningkatkan kemampuan serta potensi masyarakat sebagai sumber daya yang dapat berpartisipasi di sektor pariwisata. Prinsip pelatihan pada masyarakat terkait dalam *Good Tourism Governance* seperti yang diuraikan oleh Sunaryo (2013) bahwa prinsip tersebut dapat dinilai dari ada atau tidaknya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip pelatihan pada masyarakat terkait di Pos Bloc Medan masih terbilang

sangat minim. Hal ini karena belum adanya program-program pelatihan yang diselenggarakan secara langsung dan khusus oleh pengelola Pos Bloc Medan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik dari pengunjung dan juga pelaku UMKM. Pelatihan yang didapatkan oleh pelaku UMKM justru berasal dari pihak eksternal Pos Bloc Medan

#### 4.10 Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Menurut Timothy dan Boyd (2003), promosi nilai budaya lokal dalam pariwisata tidak hanya memperkuat identitas destinasi, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan Masyarakat lokal dan pelestarian warisan budaya. Hal diperkuat oleh pendapat Hall (2007), yang menegaskan bahwa integrasi elemen lokal dalam tata kelola pariwisata dapat meningkatkan keterlibatan komunitas, menumbuhkan kebanggaan lokal (local pride), dan menciptakan daya tarik otentik bagi wisatawan. Dalam implementasinya, promosi nilai budaya kelokalan dapat diwujudkan melalui desain arsitektur, pemilihan pelaku usaha lokal, penyelenggaraan acara budaya, serta penyajian produk kreatif yang mencerminkan identitas local.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski tenant lokal dan acara budaya banyak digelar, integrasi budaya lokal ke dalam pengalaman destinasi masih perlu diperkaya dengan platform digital dan narasi yang lebih sistematis.

Prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata dapat diketahui bahwa prinsip tersebut tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola yang baik, tetapi juga digunakan sebagai asas untuk menciptakan lingkungan usaha yang mendukung dan inovatif, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada konteks wisata kreatif seperti Pos Bloc Medan, peneliti melihat bahwa penerapan prinsip *Good Tourism Governance* dapat berperan dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan UMKM yang ada. Dan hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek pertumbuhan UMKM, yaitu melalui akses permodalan, kualitas sumber daya manusia (SDM), akses pasar dan pemasaran, infrastruktur dan teknologi, serta regulasi dan kebijakan pemerintah.

Setiap prinsip menunjukkan kontribusi nyata di Pos Bloc Medan dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan UMKM terutama melalui akses pasar yang semakin luas dan meningkat, peningkatan kualitas SDM, serta penggunaan infrastruktur dan teknologi yang semakin maju dengan menyesuaikan perkembangan digital saat ini. Namun masih terdapat tantangan pada faktor akses permodalan yang dimana pelaku UMKM di Pos Bloc Medan masih cenderung mengandalkan modal dari tabungan milik pribadi, serta tantangan pada faktor regulasi dan kebijakan pemerintah ditemui dari belum adanya keterlibatan secara langsung oleh pihak pemerintah dalam tata kelola pariwisata di Pos Bloc Medan yang dapat berdampak baik pada pertumbuhan UMKM, sehingga UMKM di Pos Bloc Medan hanya merasakan kemudahan dalam mengakses perizinan usaha saja.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *Good Tourism Governance* di Pos Bloc Medan menunjukkan kontribusi positif terhadap inovasi dan pertumbuhan UMKM, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi secara formal dan menyeluruh. Prinsip-prinsip seperti partisipasi masyarakat, keterlibatan pemangku kepentingan, kemitraan lokal, keberlanjutan sumber daya, serta promosi nilai budaya lokal telah diterapkan secara bertahap. Keberhasilan ini tercermin dalam meningkatnya akses pasar, kualitas SDM, dan pemanfaatan infrastruktur bagi pelaku UMKM. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan ruang partisipatif, minimnya peran pemerintah daerah, belum optimalnya pelatihan, serta ketiadaan SOP lingkungan dan sistem evaluasi publik. Selain itu, belum kuatnya pengangkatan identitas budaya lokal sebagai citra destinasi juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penguatan kebijakan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi nilai budaya lokal perlu ditingkatkan agar Pos Bloc Medan dapat berperan maksimal sebagai ruang kreatif publik yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan..

### Saran

- a. Pos Bloc Medan perlu meningkatkan prinsip partisipasi masyarakat dengan membentuk forum aspirasi dan sistem pelaporan digital yang terbuka.
- b. Perlu juga membentuk kolaborasi pengelola dengan pemangku terkait seperti Pemerintah Daerah atau Dinas Pariwisata, komunitas lokal, pelaku usaha, dan pengunjung untuk meningkatkan pengembangan Pos Bloc Medan dan pelaku usaha di dalamnya.
- c. Menerapkan pelatihan masyarakat khususnya untuk pelaku usaha di Pos Bloc Medan agar dapat meningkatkan daya saing usahanya.
- d. Pengelola Pos Bloc Medan perlu menyusun dokumen resmi seperti SOP pengelolaan lingkungan, kebijakan pelatihan, dan prosedur evaluasi program agar prinsip-prinsip *Good Tourism*

- Governance* bisa dijalankan dengan lebih sistematis dan teratur.
- e. Perlu adanya kebijakan yang tegas untuk memberi ruang bagi pelaku UMKM dan juga pemula membuka usaha di Pos Bloc, sehingga prinsip kemitraan dan kepemilikan lokal dapat diwujudkan.
  - f. Pengelola juga perlu mengembangkan strategi promosi nilai budaya lokal dengan konsisten baik itu melalui media sosial dan program-program yang diselenggarakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1] Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Bungin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian; Kontemporer*. Jakarta, Rajawali Pers.
- [2] Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- [3] Fadlan, A., Yusuf, M., & Perdana, H. (2023). *Produktivitas UMKM Terhadap Daya Jual Produk*. Penerbit tahta Media.
- [4] Goodwin, H. (2011). *Taking Responsibility for Tourism*. Amerika Serikat: Goodfellow Publisher.
- [5] Kharirunnisa L., Harmadji, D. E., Ristiyana, R., Mekaniwati, A., Harto, B., Widaja, W., ... & Purwanti, T. (2022). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- [6] IAN & BPKP. 2000. *Pelayanan Publik*. Malang: CV Citra Malang.
- [7] Riswanto, A., Zafa, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., ... & Hikmah, A. N. (2023). *Ekonomi Kreatif “Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia”*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- [8] Pongtiku, Arry (Ed). (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Saja*. Jayapura: Nulisbuku. Prasetyo, Adhi, dkk. 2021. *Konsep Dasar E-Commerce*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Samsu, S. (2021). *Metode Penelitian: (teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka.
- [9] Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik - Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT.Revika Aditama.
- [10] Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Mandar Maju, Bandung.
- [11] Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Alfabeta Cv.
- [12] Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata*. Gava Media Publisher. Yogyakarta.
- [13] Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage Tourism*. Pearson Education.
- [14] Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta:Kencana.

### Jurnal/Skripsi

- [15] Anggraini, R. D., Rasamashar, W., & suci, R, G. (2024). Pengaruh Mental Accounting, Teknologi Informasi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja UMKM Kecamatan Binawidya Pekanbaru. *Akuntansi* 45, 5(1). 198-216.
- [16] Aruan, E. (2023). Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Digital Marketing.
- [17] Avriyanti, S. (2022). Pengaruh Inovasi Produk Dan Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Pada UMKM Bidang Kuliner Di Kabupaten Tabalong). *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(1), 61-73.
- [18] Bate’e, A. T, dkk. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada UMKM Ditinjau Dari Aspek Pasar Dan Pemasaran (Studi Kasus Sop Ayam Pak Mim Klaten Di Cikarang Selatan). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1).
- [19] Bramwell, B. (2011). Governance, the state and sustainable tourism: A political economy approach. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4), 459–477.
- [20] Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical Research on The Governance of Tourism And sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421.

- [21] Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78-90.
- [22] Hall, C. M. (2011). A Typology Of Governance And Its Implications For Tourism Policy Analysis. *Journal of sustainable tourism*, 19(4-5), 437-457.
- [23] Hernanda, D. W. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis *Good Tourism Governance* dalam Pengembangan Destinasi Wisata (Studi Kasus Destinasi Wisata Penyangga Zona Kawah Ijen “Kampung Kopi” Kelurahan Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- [24] Heryana, Ade. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. <https://www.researchgate.net/publication/>.
- [25] Heryanto, Y. (2014). Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Logika*, 12(3), 23-40.
- [26] Hidayat, I. K., & Rahayu, S. (2018). *Good Tourism Governance* Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Di Kawasan Kotagede Kota Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 3(4), 545-561.
- [27] Iqbal, M., dkk (2024). Analisis Pengaruh Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada UMKM Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 226-235
- [28] Judijanto, L., Ramdhani, R., & Arini, R. E. (2024). Bibliometric Analysis Of The Implementation of Good Governance on Community Welfare. *West Science Interdisciplinary Studies*.
- [29] Kurniawan, M. Z., & Gitayuda, M. B. S. (2020). Peran Inklusi Keuangan Pada Perkembangan UMKM di Madura. In *Conference on Innovation and Application of science aand Technology (CIASTECH)* (Vol. 6, pp. 97-104).
- [30] Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- [31] Liyushiana, L., Rahmat, D., Dewi, Y., Br, S. P., Khairunnisa, M. C., & Oceani, P. M. (2024). From Compliance to Innovation: A Comprehensive Analysis of Pos Bloc Medan's Tourism Infrastructure. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 519, p. 03002). EDP Sciences.
- [32] Mardikaningsih, R. (2023). Strategi Inovasi dan Pemasaran Media Sosial Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif UMKM di Kota Surabaya, *Jurnal Baruna Horizon*, 6(2), 58-67.
- [33] Mawuntu, P. S. T., & Aotama, R. C. (2023). Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan UMKM Kota Tomohon di Era New Normal. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 466-472.
- [34] Meutia Dewi, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Medan: IPDN
- [35] Meyer, D. F., & Rheeders, T. (2024). The influence of good governance on the tourism sector: The case of South Africa. *Journal of Tourism Leisure and Hospitality*, 5(2), 84-95.
- [36] Muhamad, M. (2012). Studi Perkembangan Wilayah dan Daya dukung lingkungan Kepariwisata di Wilayah Yogyakarta Utara. *Jurnal Kawistra*, 2(1).
- [37] Naufalin, L. R. (2020). Tantangan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(1), 95-102.
- [38] Ningrum, E. A., & Isril, I. (2016). Studi Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014 (Doctoral dissertation, Riau University).
- [39] Nofianti, L. (2015). Kajian Terhadap Pengukuran Governance (Indikator dan Prinsip Governance). 1-30.
- [40] Rukayah, R. S., & Juwono, S. (2018). Arsitektur dan Desain Kota Hibrida Pada Kantor Pos Dan Alun-Alun Di Medan. *Tata Loka*, 20(3), 317-330.
- [41] Smith, J. (2022). The Impact of Visual Learning Media on Student Engagement. *Journal of Education and Technology*, 35(2), 45-60
- [42] Susanto, H. (2017). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- [43] Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. (2023). *Good Tourism Governance* Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk semanting Kabupaten Berau. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 658-666.
- [44] Wuryandani, D., & Meilani, H. (2013). Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 103-115.
- [45] Yuksel, F., Bramwell, B., & Yuksel, A. (2005). Centralized and decentralized tourism governance in Turkey. *Annals of Tourism Research*, 32(4), 859–886.

**Regulasi**

- [46] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Kegiatan Usaha-Usaha Sektor Pariwisata Resiko Rendah Sampai Dengan Menengah.
- [47] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- [48] Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [49] UNWTO. 2020. About the Regional Programme for Asia & the Pacific dalam <http://asiapacific.unwto.org> diakses 1 Maret 2025.

**Internet**

- [50] Detik Travel. (2024). Indeks Pariwisata RI Tinggi, tapi Kunjungan Rendah, ini Catatan buat Menpar Baru. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7600104/indeks-pariwisata-ri-tinggi-tapi-kunjungan-rendah-ini-catatan-buat-menpar-baru> (diakses pada 14 Februari pukul 21.43 WIB).
- [51] Pos Indonesia.co.id, <https://www.posindonesia.co.id/id/articles/detail/pos-bloc-medan-resmi-dibuka-untuk-umum> (diakses pada 16 Mei 2025 pukul 14.42 WIB).
- [52] World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Government Effectiveness: Percentile Rank Indonesia, <https://data.worldbank.org/indicator/GE.PER.RNK?end=2023&locations=ID&start=1996&view=chart> (diakses pada 14 Februari 2025 pukul 20.26 WIB)